

**ARUS BALIK IMIGRAN AMBON DI BELANDA: PROSES REPATRIASI
'SUKU MALUKU' TAHUN 1962-1988**



Skripsi

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana
Humaniora pada Fakultas Ilmu Budaya

Universitas Hasanuddin

Disusun Oleh:

Isda Zulfani Ode

F061201030

DEPARTEMEN ILMU SEJARAH

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2024

HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN

Sesuai dengan surat penugasan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Nomor 339/UN4.9/KEP/2024 pada Tanggal 25 April 2024. Dengan ini kami menyatakan menerima dan menyetujui skripsi yang berjudul, “Arus balik Imigran Ambon di Belanda: Proses Repatriasi ‘Suku Maluku’ tahun 1962-1988” yang disusun oleh Isda Zulfani Ode, F061201030 untuk diteruskan kepada panitia ujian skripsi di Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.

Makassar, 05 November 2024

Konsultan I



Drs. Dias Pradadimara, M.A., M.S

NIP. 196412171998031001

Disetujui untuk diteruskan kepada Panitia Ujian Skripsi.

Mengetahui

Ketua Departemen Ilmu Sejarah



Dr. Ilham, S.S., M.Hum

NIP. 19760827 200801 1 011

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Arus Balik Imigran Ambon di Belanda: Proses
Repatriasi 'Suku Maluku' tahun 1962-1988

Nama Lengkap : Isda Zulfani Ode

NIM : F061201030

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Skripsi pada tanggal 18 November 2024 dan dinyatakan sah memenuhi syarat untuk lulus pada program sarjana di Departemen Ilmu Sejarah Universitas Hasanuddin.

Konsultan I

Drs. Dias Pradadimara, M.A., M.S

NIP. 196412171998031001

Dekan Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin

Prof. Dr. Akin Duli, M.A

NIP. 196407161991031010

Ketua Departemen Ilmu Sejarah
Universitas Hasanuddin

Dr. Ilham, S.S., M.Hum

NIP. 19760827200801101

PENGESAHAN UJIAN

**ARUS BALIK IMIGRAN AMBON DI BELANDA: PROSES REPATRIASI
'SUKU MALUKU' TAHUN 1962-1988**

Oleh

ISDA ZULFANI ODE

F061201030

Skripsi ini telah diuji pada Senin, 18 November 2024 dan dinyatakan lulus.

Makassar, 25 November 2024

- 
1. Drs. Dias Pradadimara, M.A., M.S Ketua :
 2. Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum Penguji I :
 3. Dr. Ilham, S.S., M.Hum Penguji II :
 4. Drs. Dias Pradadimara, M.A., M.S Konsultan I :

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Isda Zulfani Ode

NIM : F061201030

Departemen : Ilmu Sejarah

Fakultas-Universitas : Ilmu Budaya-Universitas Hasanuddin

Judul Skripsi : Arus Balik Imigran Ambon di Belanda: Proses Repatriasi
'Suku Maluku' tahun 1962-1988

Menyatakan dengan sungguh-sungguhnya dan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana adalah hasil karya sendiri.

Makassar, 25 November 2024

  
Isda Zulfani Ode

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Tidak ada ungkapan syukur yang cukup atas segala nikmat dan kuasa Allah yang menyertai proses penulisan skripsi ini. Siapa sangka, tema yang pada awalnya penulis ragukan, akan berlangsung hingga satu tahun penelitian. Perjalanan ini bahkan membawa saya kembali ke tanah kelahiran, Ambon, bertemu dengan orang-orang lama bahkan kenalan baru. Semua ini tidak mungkin penulis lalui tanpa bimbingan, doa, dan bantuan dari orang-orang yang dihadirkan Tuhan.

Ucapan terima kasih penulis kepada kedua dosen Pembina Pra Skripsi, Drs. Dias Pradadimara, M.A.,M.S. dan Dr. Ida Liana Tanjung, S.Pd., M.Hum, yang telah membantu penemuan judul skripsi ini. Setelah menyelesaikan proposal, penulis kembali bertemu Drs. Dias Pradadimara, M.A.,M.S selaku penasihat akademik dan pembimbing skripsi saya. Karya ini tidak akan berhasil, tanpa bimbingan beliau yang melengkapi kekurangan didalamnya, terima kasih untuk waktu dan kesabarannya pak. Serta kepada dosen-dosen Ilmu Sejarah lainnya, yang dari mereka penulis menopang banyak ilmu dan pengetahuan.

Penulis tidak akan mencapai titik ini tanpa sosok panutan, umi saya tercinta, Wa Ode Dahiana. Terima kasih atas segala doa yang engkau panjatkan untuk anak-anak mu didalam sujud terkahir mu, tak ada manusia sekuat dan setegar dirimu yang pernah anakmu ini jumpai. Terima kasih juga teruntuk Abi dan adik-adik, serta kerabat penulis.

Proses penulisan ini juga didukung oleh para narasumber, ucapan terima kasih banyak kepada om Ulis, narasumber pertama dengan ragam pengetahuannya, yang darinya penulis diberi tanda mata berupa dua jilid buku ‘Dibawah Naungan Gunung Nunusaku’, karya Dieter Bartels. Kepada keluarga tante Paulien, yang mau memberi sambutan hangat atas kunjungan saya, Ibu Noora dan ibu Ida yang mengenalkan penulis dengan anggota amanisal, tante dan om anggota amanisal yang mau direpotkan dan diwawancarai, kak dolly dari perpustakaan rumphius yang banyak membantu penulis untuk mencari sumber tulis mengenai skripsi ini.

Kawanan yang menemani dikala suka dan duka, terima kasih nona-nona manis, Intan, Anisa, Fikriyah. Penulis juga diberkahi teman-teman kampus yang suportif, Wulan, Rara, Tiya, Kimel, Rani, Mute, Kira, Holni, Ana, Darma, Nura, Sarah, Dea, Mba Leon, Nadya, juga teman-teman Ilmu Sejarah 20 lainnya. Terkhusus teman UKMM, Leo dan Fitra terima kasih sudah banyak membantu penulis.

Tidak kurang juga, terimakasih kepada para peneliti terdahulu yang penulis lampirkan dalam skripsi ini, tanpa ilmu dan sumbangan karya mereka, skripsi ini tidak akan pernah rampung. Dalam perjalanan ini, penulis dipertemukan dengan salah seorang antropolog yang hebat, Prof. Fridus Steijlen, terimakasih atas waktu yang beliau luangkan untuk penulis dan tanda mata berupa buku ‘Meniti Arti’ hasil penelitian beliau dan kawanannya.

Makassar, 18 November 2024

Isda Zulfani Ode

DAFTAR ISI

HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN UJIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR SINGKATAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Batasan Masalah.....	6
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Manfaat Penelitian.....	7
1.6 Tinjauan Pustaka.....	8
1.6.1 Penelitian Relevan	8
1.6.2 Landasan Konseptual.....	15
1.7 Metode Penelitian.....	17
1.8 Sistematika Penulisan.....	19
BAB II <i>KONINKLIJKE NEDERLANDSCH INDISCH LEGER</i> (KNIL)	20
2.1 Sejarah Tentara Kerajaan Hindia Belanda (1830-1950).....	20
2.2 KNIL Pada Periode Pendudukan Jepang di Indonesia (1942-1945)	25
2.3 Masuknya Belanda Kembali ke Indonesia (1945-1949)	29
2.4 Pengakuan Kedaulatan NKRI dan Situasi Tentara KNIL Maluku	36

KBAB III KEDATANGAN ORANG MALUKU DI BELANDA	40
3.1 Nasib Tentara Maluku	44
3.2 Hidup di Barak-Kamp	47
3.2.1 Organisasi Kedaerahan	51
3.2.2 Pendidikan Anak Maluku.....	54
3.3 Masa Depan Imigran Maluku.....	57
3.3.1 Mempertahankan Identitas Maluku	60
BAB IV REPATRIASI ‘SUKU MALUKU’ DARI BELANDA TAHUN 1962-1988.....	65
4.1 Mengapa Pulang?	68
4.2 Panitia Kerja Urusan Repatriasi ‘Suku Maluku’	70
4.3 Proses Repatriasi ‘Suku Maluku’ Tahun 1962-1988	77
4.3.1 Penempatan ‘Suku Maluku’ ke Makassar.....	80
4.3.2 <i>Carita Katong Pulang ka Maluku</i>	81
BAB V KESIMPULAN	87
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN.....	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 2 Keberangkatan orang Maluku ke Rotterdam dengan kapal kota Inten, 1951. (Koleksi foto Arsip Nasional Belanda)	43
Gambar 3. 3 Ilustrasi Peta Kepulauan Maluku (Sumber: PPID Maluku)	51
Gambar 3. 4 Permukiman Kamp Lunetten, tempat tinggal orang Maluku di Vugh, 1984. (Koleksi foto Arsip Nasional Belanda)	53
Gambar 4. 1 Potret keluarga Maluku menuju Italia untuk pulang ke Indonesia, 1962. (Koleksi foto arsip nasional Belanda)	68
Gambar 4. 2 Potret warga Maluku yang akan pulang ke Indonesia dari bandara Schiphol, 1968. (Koleksi foto arsip nasional Belanda).....	74

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah tentara KNIL (Militaire spectator, 1950).....	24
Tabel 3. 1 Daftar nama kapal yang ditumpangi keluarga eks-KNIL Maluku, (nationaalarchief.nl)	41
Tabel 3. 2 Angka-angka diambil dari Komisi Verwey-Jonker (1959), Kementerian CRM (1968), Veenman (1989) dan Vleugels (1998)	58

DAFTAR SINGKATAN

CAZ	<i>Commissariaat van Ambonezenzorg</i>
CCS	<i>The Combined Chief of Staff</i>
GNI	Gerakan Nusa Ina
HAWIN	<i>Hoofd van de Ambonese Woonoorden In Nederland</i>
KBRI	Kedutaan Besar Republik Indonesia
KL	<i>Koninklijke Landmacht</i>
KM	<i>Koninklijke Marine</i>
KMB	Konferensi Meja Bundar
KNIL	<i>Koninklijke Nederlandsch-Indische Leger</i>
KRPPT	Kepentingan Rajat Pulau-Pulau Ter-Selatan
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
NICA	<i>Netherlands Indies Civil Administration</i>
NIT	Negara Indonesia Timur
PEMDA	Pemerintah Daerah
POW	<i>Prisoner of War</i>
RIS	Republik Indonesia Serikat
RMS	Republik Maluku Selatan
SEAC	<i>South East Asia Command</i>
SWPA	<i>South West Pasific Area</i>

ABSTRAK

Isda Zulfani Ode, dengan judul “Arus Balik Imigran Ambon di Belanda: Proses Repatriasi ‘Suku Maluku’ tahun 1962-1988, dibimbing oleh Drs. Dias Pradadimara, M.A., M.S.

Penelitian ini mengkaji kelompok eks-KNIL Maluku yang bermigrasi ke Belanda akibat tekanan politik pada tahun 1951, tetapi kemudian memutuskan untuk kembali ke Maluku antara tahun 1962-1988. Proses ini dimulai dengan keputusan Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949, yang mengharuskan Belanda menarik dan membubarkan pasukannya, termasuk KNIL. Sesuai ketentuan militer, demobilisasi tentara harus dilakukan berdasarkan keinginan mereka dan di tempat asal mereka. Namun, eks-KNIL Maluku yang tidak bisa pulang karena konflik di daerah asalnya kemudian diperintah untuk pergi ‘sementara’ ke Belanda.

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui alasan kelompok Maluku memutuskan untuk kembali ke kampung asalnya. Dengan menggunakan sumber primer dan sumber sekunder sesuai dengan tema penelitian, data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis sejarah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sebagian besar kelompok Maluku yang pulang merupakan mantan tentara yang bertugas di KNIL sebelum tahun 1945. Setelah lama merantau di luar Maluku, mereka memutuskan untuk pulang dan menghabiskan masa tuanya di kampung asal mereka.

Penelitian ini diharapkan dapat membangun pemahaman pembaca mengenai perjalanan kelompok eks-KNIL Maluku dari Belanda hingga kembali ke Indonesia sesuai dengan perspektif sejarah.

Kata Kunci: Sejarah KNIL, Repatriasi ‘Suku Maluku’, Orang Maluku di Belanda

ABSTRACT

Isda Zulfani Ode, with the title ‘The Backflow of Ambon Immigrants in the Netherlands: The Repatriation Process of the ‘Moluccan Tribe’ in 1962-1988, supervised by Drs. Dias Pradadimara, M.A., M.S.

This research examines a group of Maluku ex-KNIL who migrated to the Netherlands due to political pressure in 1951, but then decided to return to Maluku between 1962 to 1988. This process began with the decision of the Round Table Conference in 1949, which required the Netherlands to withdraw and disband its troops, including the KNIL. As per the military regulations, the demobilisation of soldiers had to take place on their own terms and in their place of origin. However, Moluccan ex-KNIL who could not return home due to the conflict in their home region were then ordered to go ‘temporarily’ to the Netherlands.

This research aims to find out the reasons why the Moluccans decided to return to their home villages. Using primary and secondary sources in accordance with the research theme, the data collected was then analysed using the historical analysis method.

The results show that most of the Moluccans returned were former soldiers who served in the KNIL before 1945. After migrating outside Maluku for a long time, they decided to return home and spend their old age in their hometown.

This research is expected to build readers' understanding of the journey of the Maluku ex-KNIL group from the Netherlands to returning to Indonesia in accordance with historical perspectives.

Keywords: KNIL History, Repatriation of ‘Moluccan Tribes’, Moluccans in the Netherlands

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kedekatan Maluku dan Belanda membuat masyarakat luas mengenal Maluku sebagai antek atau pelayan setia Belanda. Berawal dari Kepulauan Maluku bagian Timur Indonesia, yang menjadi wilayah sorotan jajahan Belanda akibat ketertarikan akan tanaman rempah yang hanya tumbuh di sana, dibangunlah sebuah pelabuhan entrepot di kota Ambon sebagai pertukaran rempah. Namun, ketika harga jual rempah jatuh di pasar dunia, kekayaan yang dulu dinikmati masyarakat Maluku lambat laun menjadi sirna¹. Setelah VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) dibubarkan pada 31 Desember 1799, wilayah Hindia Timur resmi diserahkan kepada Pemerintah Belanda. Baik aset, pegawai, serta utang VOC sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Belanda. Nama Hindia Timur berganti menjadi Hindia Belanda dan seluruh wilayah jajahannya secara langsung menjadi wilayah Pemerintahan Belanda².

Pemerintahan baru tentu membutuhkan sumber daya manusia dalam jumlah yang telah diperhitungkan, untuk membangun wilayahnya. Akan tetapi, untuk mendatangkan pegawai dari Belanda akan memakan biaya yang tinggi dan secara logistik hampir tidak memungkinkan. Oleh karena itu pemerintah

¹Fridus Steijlen, 'Nationalism in exile: Nationalism among Moluccans in The Netherlands 1951–1990', *History of European Ideas*, Vol. 15, No. 4-6 (1992), Hlm. 780

²Nur Izzatul dan Dwi Kurnia, "Latar Belakang Pemilihan Tahuna sebagai Pusat Ekonomi dan Politik masa Hindia Belanda", *Tumotawa*, Vol. 3, No. 1 (Juni., 2020), Hlm. 40.

Hindia Belanda mengubah strateginya dengan mengikuti gaya Britania yang memanfaatkan orang Kristen suku Karen di Birma, dengan memanfaatkan minoritas Kristen di wilayah-wilayah tertentu, khususnya Ambon dan Manado. Pada tahun 1830 dibentuklah Tentara Kerjaan Hindia Belanda (KNIL, *Koninklijke Nederlandsch-Indische Leger*) dan secara perlahan mulai merekrut orang Maluku Kristen, dengan menawarkan hadiah berupa gaji dua kali lipat dari pribumi lain, akses pendidikan yang mudah, gaji pensiun, hingga tempat tinggal yang layak. Akan tetapi, pekerjaan tentara masih belum menjadi minat orang Maluku, baru setelah 1896 sekitar 1.000 lebih orang Ambon mendaftarkan diri.³

Maluku telah menjadi bagian dari Negara Indonesia Timur (NIT) yang didirikan pada tahun 1946. Ingin mengembalikan kuasa koloninya, pada Desember 1948 Belanda kembali mengadakan Agresi Militer kedua melawan kubu Republik, dengan tentara KNIL Ambon yang turut berpartisipasi. Aksi Belanda ini mendapat tuntutan publik internasional, khususnya oleh PBB. Demikianlah pada 23 Agustus sampai 2 November 1949, diadakan perundingan kembali antara Belanda dan Kaum Republik Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag. Dari hasil perundingan tersebut Belanda pada akhirnya menyerahkan kedaulatan sepenuhnya kepada Republik Indonesia Serikat⁴.

³Dieter Bartels, *Dibawah Naungan Gunung Nunusaku 'Muslim-Kristen Hidup Berdampingan di Maluku Tengah'*, (Jakarta: PT Gramedia, 2017), Hlm. 634-642

⁴*Ibid*, Hlm. 674

Setelah perundingan KMB berakhir, mulai tanggal 27 Desember 1949 struktur federal negara Indonesia pun dihapuskan dan berubah menjadi negara kesatuan yakni Republik Indonesia Serikat. Kemungkinan NIT dibubarkan tak dapat dielak, terbukti pada tanggal 21 April 1950, Presiden NIT, Sukawati setuju untuk bersatu dengan Republik. Orang-orang Maluku pun merundingkan kebebasannya dan mayoritas memilih untuk memisahkan diri, alhasil pada tanggal 25 April Republik Maluku Selatan (RMS) resmi di proklamasikan di kota Ambon. Proklamasi RMS ini tidak diakui oleh Republik Indonesia, di mana menyebabkan pertempuran sengit RMS dan tentara Indonesia, namun pada tanggal 4 November kota Ambon berhasil direbut oleh Tentara Indonesia⁵.

Pada saat berlangsungnya proklamasi RMS, sekitar 4000 tentara eks-KNIL asal Maluku yang berada di pulau Jawa menunggu untuk didemobilisasi. Begitu terjadi pertempuran antara tentara Indonesia dan RMS di Ambon, eks-KNIL Maluku tidak ingin didemobilisasi di wilayah Republik, mereka bersimpati kepada saudaranya di sana dan ingin kembali ke Maluku. Pemerintah Indonesia dan Belanda yang tidak ingin adanya tambahan pasukan terlatih menuju Ambon, menghadapi kebuntuan ini pemerintah Belanda melalui perintah Militer, pada 1951 memberangkatkan sekitar 12.500 anggota KNIL bersama keluarganya ke Belanda untuk sementara waktu hingga situasi Indonesia stabil⁶.

⁵Joaniek Vreeswijk, 'Steun in de strijd een vrije Zuid-Molukse Republiek', *Thesis*, (Utrecht: Universitas Utrecht, 2018), Hlm. 11

⁶Steijlen (1992), *Op. cit*, Hlm 781. (Dalam paragraf ini, berfokus pada pencegahan tambah anggota KNIL yang berasal dari etnis Maluku agar tidak

Kedatangan mendadak orang Maluku di Belanda membuat posisi yuridis mereka di sana sangatlah rumit, mereka dianggap sebagai penduduk kewarganegaraan Indonesia, namun mereka hanya mengakui diri mereka sebagai warga negara RMS, sebagai bentuk tanggung jawabnya, pemerintah Belanda bersedia untuk mendanai warga Maluku selama berada di Belanda⁷. Sekalipun mereka lama bekerja di bawah pemerintahan Belanda, tetapi orang Maluku tidak mengakui diri mereka sebagai warga negara Belanda, kedatangan mereka pun dianggap hanya sementara waktu oleh pemerintah Belanda, tempat tinggal mereka dibatasi dalam kamp-kamp bekas dan dilarang untuk bekerja. Lama tidak memiliki status kewarganegaraan, pada tahun 1976 warga Maluku diberikan kewarganegaraan Belanda setelah melalui proses politik yang panjang⁸.

Kehidupan orang Maluku di Belanda cukup memprihatinkan, pemerintah Belanda sejak kedatangan mereka tidak berniat untuk membantu mewujudkan negara merdeka yang mereka impikan. Mereka tidak diperbolehkan untuk bekerja, bertempat tinggal di kamp-kamp bekas, menjalani kehidupan yang lebih keras dari sebelumnya, dengan harapan agar mereka

menginjak kaki di Ambon, untuk menjaga hubungan diplomatik antara Negara baru Indonesia dan Belanda).

⁷Fridus Steijlen, 'Shifting to the core of the ethno-cultural position Moluccan camps and wijken revisited', *Migration and Integration Research: Filling in Pennix's Heuristic Model*, IMISCOE, (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2013), Hlm. 154

⁸Alison Fischer, 'Colonialism, Context and Critical Thinking: First Steps Toward Decolonizing the Dutch Legal Curriculum', *Utrecht Law Review*, Vol. 18, No. 1 (May., 2022), Hlm. 14–28.

melupakan semangat juang untuk RMS dan memilih untuk kembali ke Indonesia. Hasil baik jauh dari harapan, pemerintah yang menyusun strategi kampanye repatriasi pada November 1955, berharap mereka yang ingin pulang menyentuh angka 40-60 persen dari penduduk Maluku. Pada akhirnya, mereka yang bersedia pulang hanya berjumlah tidak lebih dari 200 orang⁹.

Secara praktis mereka yang memilih kembali ke tanah air sebelum tahun 1975 tidak berjalan dengan baik, dalam arsip VWS (ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport) mencatat bahwa sebanyak 2.443 orang Maluku telah kembali ke Indonesia antara tahun 1952 sampai 2003. Gelombang repatriasi tahun 1952-1965 tidak berlangsung dengan baik, dikarenakan kurangnya hubungan relasi antara pemerintah Belanda dan Indonesia. Gelombang kedua tahun 1965-1970, proses pemulangan gelombang ini telah diperhatikan secara khusus oleh kedua negara (Belanda-Indonesia), bahkan Indonesia sendiri telah membentuk panitia khusus untuk kepulangan orang Maluku pada 1968.

Dalam praktiknya, terdapat sebagian kelompok yang menolak kepulangan mereka. Sehingga hanya sebagian kecil kelompok repatrian yang mencapai pulau Ambon. Gelombang terbaru yakni pada 1975 melalui perjanjian Wassenaar, kedua belah pihak pemerintah membentuk skema repatriasi komite

⁹Bung Penonton, *De Zuidmolukse Republiek*, (Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, 1977), Hlm. 63-64

bersama, melalui skema ini banyak dari warga Maluku yang mendaftar untuk kembali ke tanah air tercatat hingga 561 orang yang mendaftar¹⁰.

Tibanya mereka di Indonesia memperoleh berbagai tanggapan dari kalangan masyarakat, melihat bahwa kondisi negara yang menghadapi berbagai konflik hingga akhir tahun 1960-an, banyak dari kelompok Maluku yang pada akhirnya kesulitan untuk mencapai tujuan akhir mereka, yakni Pulau Ambon. Tidak sedikit dari mereka yang memutuskan untuk menetap di Ibu kota Jakarta, ataupun bermigrasi ke wilayah lain di Indonesia, namun ada juga mereka yang tetap memilih Ambon sebagai kota tujuannya. Melihat hal ini, penulis secara khusus memilih kasus yang mungkin nantinya terdapat kesulitan dalam proses penelitiannya, yakni kelompok Maluku yang berhasil mencapai kota Ambon setelah tiba di tanah air dan memilih untuk menetap di sana.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka fokus penulis pada permasalahan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Mengapa imigran Maluku pada akhirnya memutuskan untuk kembali ke Ambon antara tahun 1962-1988?

1.3 Batasan Masalah

Dalam penulisan sejarah, terdapat dua batasan penting, yaitu batasan spasial dan temporal. Batasan spasial dalam penelitian ini adalah kota Ambon, yang dipilih karena dianggap sebagai suatu keberhasilan dari proses repatriasi.

¹⁰Jakob Koolschijn, 'Pulang dari Belanda: Ambivalente hechttingen bij Molukse Retourmigranten', *Thesis*, (Amsterdam: Amsterdam University, 2023), Hlm. 13-14

Sedangkan batasan temporal mencakup periode 1962 hingga 1988. Meskipun masyarakat Ambon mulai kembali sejak 1953, pemerintah Indonesia baru memulai persiapan resmi pada 1968 dengan membentuk Panitia Kerja Urusan Repatriasi 'Suku Maluku'. Program repatriasi gelombang kedua dimulai pada 1971, namun minatnya menurun dibanding 1968 dan kembali meningkat pada 1975. Penelitian dibatasi hingga 1989, ketika program repatriasi mulai diabaikan karena generasi ketiga masyarakat Maluku jarang berminat untuk pulang.

1.4 Tujuan Penelitian

Setelah merumuskan dan membatasi masalah penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang mendorong kelompok imigran Maluku memutuskan kembali ke tanah air pada periode 1962-1988.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah historiografi Sejarah Maluku, juga dapat menambah literatur sejarah lisan yang meliputi orang kecil atau yang terlupakan berupa para repatriasian masyarakat Maluku yang berpindah dari Belanda ke Ambon. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi tambahan referensi penelitian baik bagi kalangan mahasiswa maupun khalayak umum.

2. Manfaat Praktis

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru mengenai literatur proses remigrasi atau repatriasi warga masyarakat Maluku di Belanda yang kembali ke kampung halamannya.

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Penelitian Relevan

Dalam artikel yang ditulis Fridus Steijlen, *Nationalism in Exile: Nationalism Among Moluccans in the Netherlands 1950-1990*, menjelaskan setelah berakhirnya perang pasifik terjadi banyak pergejolakan di Maluku, khususnya bagi pergerakan politik. Terdapat tiga golongan politik di Maluku, pertama ialah mereka yang memiliki jiwa nasionalisme tinggi dengan membantu negara untuk melawan pendudukan kembali oleh Belanda, kedua ialah mereka yang tetap mendukung kolonial Belanda, ketiga ialah mereka yang memilih untuk separatis dan mendirikan negara sendiri (RMS)¹¹.

Yusuf A Puar dalam bukunya 'Peristiwa Republik Maluku Selatan'¹², mengumpulkan rangkaian peristiwa dari berbagai bahan sumber primer, termasuk hasil wawancara para anggota RMS ketika tengah diinterogasi. Pemerintah melihat eksistensi RMS sebagai aksi pemberontakan yang mengancam stabilitas negara. Namun, menurut RMS, khususnya Manuhutu yang menjadi juru bicara di Belanda dan Ambon,

¹¹Steijlen, (1992), *loc. cit.*

¹²Yusuf Puar, *Peristiwa Republik Maluku Selatan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1956).

kemerdekaan RMS diharapkan dapat dicapai secara damai, dalam upaya tersebut sebisa mungkin agar menghindari penggunaan kekerasan.

Jan Rath dalam tulisannya “*The Netherlands a Relucant Country of Immigration*”¹³, menjelaskan gelombang migrasi ke Belanda setelah Perang Dunia II. Gelombang pertama terdiri dari 12.500 tentara KNIL beserta keluarganya pada 1951, diikuti oleh repatriasi 300.000 orang Indo-Belanda yang dibagi dalam empat gelombang. Pola migrasi ini kemudian berubah ketika Suriname akan menyatakan kemerdekaan diawal tahun 1970an, banyak penduduk yang takut akan ketegangan situasi politik serta pertikaian etnik yang akan terjadi. Akhirnya, sepertiga dari penduduk Suriname yang berasal dari kalangan pekerja Africa-Suriname (*creoles*) dan para pekerja kontra asal India (*hindostanis*) memilih untuk menetap di Belanda, yang disambut baik oleh pemerintahan Belanda.

Warga Indo-Belanda yang tidak ingin kembali ke Belanda terpaksa harus menerima status kewarganegaraan Indonesia untuk tinggal di Indonesia. Banyak dari mereka kemudian menyesali keputusan ini dan ingin kembali ke Belanda, tetapi ditolak oleh pemerintah Belanda. Dalam artikel yang ditulis Emily Wolff, ‘*Diversity, solidarity and the construction of the ingroup among (post)colonial migrants in The Netherlands, 1945–1968*’¹⁴,

¹³Jan Rath, “The Netherlands: A Relucant Country of Immigration”, *Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie*, Vol. 100, No.5 (November, 2009) by the Royal Dutch Geographical Society KNAG.

¹⁴Emily Wolff, “Diversity, solidarity and the construction of the ingroup among (post)colonial migrants in The Netherlands, 1945–1968”, *New Political Economy*, Vol. 29, No. 1 (2024).

perdebatan mengenai hal ini berlangsung hingga akhirnya dimenangkan oleh koalisi partai yang kuat. Mereka berargumen bahwa aturan penolakan repatriasi harus mengecualikan ahli waris. Pada tahun 1960, salah seorang warga Indo-Belanda mendirikan organisasi NASSI (*the National Action Supporting Regrettants of Indonesia*) untuk memperjuangkan hak-hak warga Indo-Belanda lainnya.

Tahun 1950an dinilai juga sebagai tahun penting bagi kedatangan para imigran ke negeri Belanda. Selain Maluku dan Indo-Belanda, terdapat imigran India yang masuk ke Belanda sebagai pekerja. Ellen Bal dalam tulisannya '*Country report: Indian Migration to The Netherlands*'¹⁵, mencatat bahwa gelombang pertama migrasi orang India terjadi pada tahun 1950-an dan 1960-an. Keterampilan yang dimiliki imigran India memungkinkan mereka untuk berkontribusi dalam pembangunan perekonomian Belanda, khususnya di Amsterdam. Berbeda dengan kelompok Maluku yang cenderung mengisolasi diri dan hanya bergaul dengan sesama mereka di lingkungan kamp. Selain itu, orang Maluku juga bukan kelompok tani atau pedagang, melainkan mantan anggota tentara. Mereka perlu waktu untuk beradaptasi dengan memulai pekerjaan baru.

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai program repatriasi dimulai dengan skema repatriasi warga Maluku pada 1960-an. Pada awal 2000-an, program repatriasi juga dibuka untuk pengungsi Timor

¹⁵Ellen Bal, Country Report: Indian Migration to the Netherlands, CARIM-India RR07, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, San Domenico di Fiesole (FI): European University Institute, (2012).

Timur. Penelitian oleh Yogi Afrizal dalam ‘Upaya Indonesia dalam repatriasi warga eks Timor Timur (2000-2012)’¹⁶, mengatakan bahwa gelombang pertama repatriasi tersebut berlangsung lancar karena adanya kerjasama yang baik antara pemerintah Indonesia dengan LSM. Namun pada 2003, jumlah penduduk yang mendaftar itu menurun sehingga program ini ditutup pemerintah pada tahun 2005.

Status repatriasi mendapat penolakan dalam pandangan politik karena dinilai mengembalikan antek pemberontak akan menyalakan kembali api pemberontak, hal ini terjadi pada nasib WNI anggota eks-ISIS, Iqbal dkk (2021) dalam tulisan ‘Repatriasi WNI eks-ISIS: Antara Keamanan Negara dan Hak Asasi Manusia’¹⁷, memberikan beberapa pandangan para pakar terkait proses repatriasi ini. Seorang pengamat terorisme, Ridwan Habib, berpendapat bahwa Indonesia belum memiliki kesiapan yang serius dalam proses penanganan terosisme, sehingga untuk menunda kepulangan eks ISIS merupakan suatu keputusan yang tepat. Berbeda dengan repatriasi etnis Maluku, karena pemerintah mendukung program tersebut dan telah merencanakan program ini bersama dengan pemerintah Belanda.

Zippo Surya dalam thesisnya berjudul ‘Evaluasi Kritis Terhadap *Arrangement* Myanmar-Bangladesh Tahun 2017 tentang Repatriasi Suku

¹⁶Yogi Afrizal, “Upaya Indonesia dalam Repatriasi warga eks Timor Timur 2000-2012”, *Jurnal Online Mahasiswa*, Vol. 2, No. 1 (Oktober., 2014).

¹⁷Iqbal Baiqinu dkk, “Repatriasi WNI eks ISIS: Antara Keamanan Negara dan HAM”, *Jurnal Bedah Hukum*, Vol. 5, No. 1 (April., 2021).

Rohingya dalam Perspektif Hukum Pengungsi Internasional'¹⁸, menyimpulkan bahwa repatriasi seharusnya dilakukan secara sukarela. Dalam konteks ini, Konvensi 1951 mencantumkan tiga konsep repatriasi sukarela yang dapat diterapkan. Konsep pertama adalah pengambilan keputusan, di mana pengungsi harus mendapatkan informasi valid tentang negara tujuan mereka. Konsep kedua mencakup keputusan berdasarkan ikatan kekerabatan, kondisi ekonomi, dan keamanan di tempat pengungsian, sesuai dengan Pasal 17 Konvensi 1951 dan prinsip *non refoulement*, serta memberikan perlindungan dan hak ekonomi kepada pengungsi. Konsep ketiga menekankan pentingnya keamanan negara tujuan, di mana negara tersebut harus menjamin rasa aman bagi para pengungsi.

Contoh keberhasilan proses repatriasi juga dipengaruhi oleh kerjasama baik antara negara-negara terkait. Meskipun melalui masa kolonial yang panjang, Belanda menghormati hubungan diplomasi dengan menyiapkan dana untuk memenuhi kebutuhan imigran hingga mereka kembali ke Indonesia. Kasus lain yang serupa, namun dengan nasib berbeda, berasal dari repatriasi mantan tawanan perang dunia kedua di Uni Soviet. Buhite (1973)¹⁹ membahas hubungan yang memanas antara Amerika dan Uni Soviet, di mana Amerika berusaha membangun hubungan diplomasi

¹⁸Zippo Surya, 'Evaluasi Kritis Terhadap Arrangement Myanmar-Bangladesh Tahun 2017 Tentang Repatriasi Suku Rohingya dalam Perspektif Hukum Pengungsi Internasional', *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020)

¹⁹Russell Buhite. "Soviet-American Relations and the Repatriation of Prisoners of War 1945", *The Historian*, Vol. 35, No. 3 (1973), Hlm. 384-397. DOI: [10.1111/j.1540-6563.1973.tb00506.x](https://doi.org/10.1111/j.1540-6563.1973.tb00506.x)

untuk memulangkan warganya yang ditawan. Sayangnya, para repatrian tersebut diperlakukan secara tidak adil, karena Uni Soviet masih memandang Amerika dengan skeptis akibat perilaku mereka selama Perang Dingin.

Pamela Pattynama dalam tulisannya 'Cultural Memory and Indo-Dutch Identity Formations',²⁰ menjelaskan kondisi para repatrian Indo-Belanda gelombang pertama. Kehadiran mereka hampir tidak mendapat perhatian dari pemerintah Belanda, dan trauma akibat dipaksa pindah ke negara yang asing membuat mereka hidup dalam kesunyian. Sementara itu, generasi kedua Indo-Belanda mulai hidup lebih terbuka dan mengadopsi budaya Belanda, mereka sering kali mengungkapkan trauma yang dialami generasi pertama dalam tulisan mereka. Di kalangan imigran Maluku, banyak generasi pertama dan kedua yang memutuskan kembali ke tanah air, tetapi sebagian generasi kedua dan ketiga memilih untuk tetap tinggal di Belanda dan menikahi orang Belanda. Proses amalgamasi ini menghasilkan kelompok baru yang dikenal sebagai 'Maluku kulit putih'.²¹

²⁰Pamela Pattynama. Cultural memory and Indo-Dutch identity formations. In U. Bosma (Ed.), *Post-colonial immigrants and identity formations in the Netherlands*, IMISCOE, (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2012), Hlm. 175-192

²¹Setelah menetap di Belanda, orang Maluku yang sebelumnya tidak mau membaur dengan Belanda, namun secara perlahan mulai menerima proses eropanisasi, di mana standar kehidupan mereka mulai mengikuti gaya barat, hal ini mulai dipraktekan oleh generasi kedua dan ketiga Maluku. (Bartels :1992)

Christian De Fretes dalam tulisannya ‘Stigma diantara RMS: Pembangunan dan Demokrasi di Maluku’²², menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam menjaga perdamaian dengan aktif memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai sektor. Salah satu langkah yang disarankan adalah menghindari masyarakat dari opini yang menyesatkan, informasi palsu, dan stigmatisasi yang dapat mengancam stabilitas dan memperlambat pembangunan. Sebuah seminar bertajuk “Beta Maluku, Mau Maju” yang rencananya akan diselenggarakan di Ambon dibatalkan, karena dicurigai penggagasnya terpengaruh oleh diaspora Belanda. Hal ini memunculkan opini di kalangan masyarakat bahwa kegiatan atau dialog yang tidak melibatkan Indonesia Diaspora Network-Netherland sering diidentikkan dengan aktivitas RMS.

Mary Hehuat adalah seorang musisi asal Maluku yang hidup di Belanda, ia diberi amanat untuk membuat suatu film dokumenter yang menampilkan kehidupan generasi pertama imigran Maluku di Belanda pada tahun 1987. Film dokumenter tersebut berjudul ‘*Op weg naar huis, Molukkers in hun laatste kamp*’, di dalamnya para mantan anggota KNIL diwawancara mengenai keadaan mereka dan tanggapan mereka mengenai gelombang migrasi paksa, serta harapan mereka untuk kembali ke tanah air.

Kisah Imigran banyak diungkap dalam media, namun sebagai batasan yang sesuai dengan tema penulis, maka yang menjadi fokus penulis

²²Christian De Fretes, “Stigma diantara RMS: Pembangunan dan Demokrasi di Maluku”, *KRITIS*, Vol. 31, No. 1 (2022).

ialah hanya surat kabar yang memberitakan mengenai proses repatriasi: 1) Dalam surat kabar '*NRC Handelsblad*' pada tanggal 1 Mei 1971, terdapat sebuah petisi mengenai desakan repatriasi eks KNIL ke Indonesia. 2) Dalam surat kabar '*Leeuwarder courant : hoofdblad van Friesland*', pada tanggal 13 Februari 1978, tiba delegasi RMS dari Belanda yang melakukan kunjungan ke Ambon serta untuk melihat langsung keadaan para repatrian. 3) Dalam surat kabar '*Nieuwsblad van het Noorden*', pada tanggal 23 Desember 1971, memuat mengenai menurunnya jumlah penduduk Maluku yang akan dipulangkan sejak tahun 1968.

1.6.2 Landasan Konseptual

Repatriat umumnya diartikan sebagai individu yang kembali dari penugasan di luar negeri, baik untuk jangka waktu pendek maupun panjang, dan kembali ke negara asal untuk melanjutkan kariernya di perusahaan asal atau di unit korporasi multinasional (MNC) lainnya. Repatriasi, dalam literatur, mengacu pada transisi karyawan internasional dan keluarganya dari negara asing kembali ke negara asal setelah tinggal cukup lama di luar negeri. Ini melibatkan penyesuaian kembali di lingkungan sosial, budaya, dan profesional yang berbeda dari penugasan internasional mereka.

Dalam konteks penugasan internasional, repatriasi korporat merujuk pada karyawan yang ditugaskan oleh perusahaan mereka ke luar negeri untuk waktu yang ditentukan, biasanya antara 3-12 bulan (jangka pendek) atau lebih dari 12 bulan (jangka panjang), dengan tujuan menyelesaikan tugas tertentu. Sebaliknya, repatriasi yang diprakarsai sendiri adalah ketika

individu memutuskan dan mendanai penugasan internasional mereka sendiri untuk mengembangkan karir atau pengalaman pribadi.

Bentuk repatriasi lainnya seperti *flexpatriation* (penugasan 1-2 bulan) dan perjalanan bisnis internasional (1-3 minggu) umumnya tidak dianggap menimbulkan tantangan penyesuaian yang sama karena durasinya yang lebih pendek dan sifat penugasannya yang terfokus. Berdasarkan definisi ini, penelitian ini memandang repatriasi sebagai tahap akhir dari penugasan internasional yang berlangsung lama, di mana pekerja migran kemudian kembali ke negara asal.²³

Dari pengertian repatriasi diatas, maka sesuai dengan penjelasan penulis sebelumnya bahwa penelitian ini terkait dengan kembalinya eks-KNIL Maluku yang ada di Belanda ke tanah airnya, Indonesia. Setelah sebelumnya mereka diberangkatkan oleh militer Belanda dengan niat untuk menetap sementara (6 bulan), akan tetapi keadaan memaksa mereka untuk tetap tinggal di sana selama bertahun-tahun sejak 1951. Banyak dari mereka yang memutuskan untuk menetap di sana, namun ada juga yang kembali ke tanah air setelah kondisi Maluku dinilai sudah stabil dari maraknya konflik di masa lalu.

Penulis juga menggunakan kata ‘Suku Maluku’ untuk mengklasifikasikan kelompok Maluku yang melakukan repatriasi antara

²³Flora Chiang dkk, “Repatriation: what do we know and where do we go from here”, *The International Journal of Human Resource Management*, Vol. 29, No. 1 (Oktober, 2017), hlm. 4. [Download by: University of Adelaide Libraries]

tahun 1962-1988. Kategori ini dimaksudkan untuk membedakan kelompok yang merupakan suku asli dari wilayah Maluku dari suku pendatang lainnya. Suku Maluku sendiri berarti suku-suku yang berasal dari Maluku, termasuk Maluku Utara, Maluku Tengah, dan Maluku Tenggara, dan Maluku Barat Daya. Dalam penelitian ini, penulis hanya berfokus pada orang asli Maluku yang melakukan proses migrasi ke Belanda pada tahun 1951, dan memilih untuk kembali ke Indonesia.

1.7 Metode Penelitian

Dalam proses penelitian ini, penulis banyak mendapatkan sumber berupa sumber primer; arsip ANRI, arsip Kotamadya Makassar, arsip koran dari <https://www.delpher.nl/> , <https://mpn.kominfo.go.id/arsip> dan sumber sekunder; buku, artikel, dan skripsi terkait proses repatriasi RMS ke Ambon yang sebagian dapat diakses melalui <https://books.google.co.id/> & <https://scholar.google.com/>.

Karena sumber tertulis yang tersedia dianggap tidak memampuni, maka penulis menggunakan penelusuran sejarah lisan, melalui wawancara dengan narasumber yang dinilai dapat membagikan pengalaman pribadi mereka untuk dijadikan sebagai sumber penelitian penulis. Penulis sendiri telah melakukan pengamatan terhadap kondisi lapangan, kemudian bertemu berbagai narasumber dengan harapan dapat menggali informasi lebih lanjut mengenai masalah yang ditemukan.

Narasumber penulis sendiri adalah generasi kedua dan ketiga yang merupakan keturunan KNIL, sebagian dari mereka lahir di Indonesia maupun Belanda pada tahun 1947-1960. Menurut narasumber dari generasi kedua, mereka

yang kembali antara tahun 1953-1971 merupakan keputusan orang tua, sedang mereka yang kembali pada tahun-tahun setelahnya merupakan keputusan pribadi.

Dalam penelitian lapangan, penulis banyak merujuk pada karya-karya para peneliti terdahulu yang relevan dengan tema, seperti Dieter Bartels, Fridus Steijlen, dan Henk Smeets. Melalui penelitian mereka, penulis mendapatkan wawasan tentang komunitas Maluku di Belanda maupun mereka yang kembali ke tanah air. Meskipun hanya sebagian peneliti yang fokus pada orang-orang Maluku yang kembali, beberapa penelitian seperti yang dilakukan oleh Veenam dkk. (1994) berhasil mewawancarai 83 narasumber, diikuti oleh Jakob Koolschijn pada tahun 2023 dengan 29 narasumber. Sebagian besar penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi, sementara penulis ingin melihatnya dari perspektif sejarah.

Dalam buku *De Zuidmolukse Republiek*, Bung Penonton menulis dengan dukungan banyak sumber yang relevan, terutama terkait pengalaman kelompok eks-KNIL Maluku. Berdasarkan pengamatan penulis, Penonton, yang diduga simpatisan RMS, sangat rinci dalam menggambarkan perang gerilya RMS di Ambon. Karyanya menjadi satu-satunya yang memberikan laporan mendalam mengenai konflik tersebut.²⁴ Karya Bung Penonton juga banyak dikutip oleh peneliti lain seperti Fridus Steijlen dan Henk Smeets, yang menunjukkan bahwa buku ini memiliki nilai penting dalam penelitian mengenai RMS. Penulis menduga bahwa Bung Penonton mungkin adalah seorang eks-KNIL yang bertugas di posisi administratif, bukan sebagai prajurit.

²⁴ Lihat Bartels, 2017

1.8 Sistematika Penulisan

Penulisan ini akan memberikan gambaran isi setiap bab untuk memudahkan pembaca dalam memahami struktur penelitian:

Bab 1, mencakup latar belakang, rumusan masalah, batasan, tujuan, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode, dan sistematika penulisan.

Bab 2, membahas mengenai tentara kerajaan Hindia Belanda K.N.I.L

Bab 3, fokus pada kedatangan masyarakat Maluku di Belanda, dan aktifitas mereka selama di sana.

Bab 4, mengulas kepulangan imigran Ambon dari Belanda ke Indonesia pada tahun 1962-1988.

Bab 5, memuat kesimpulan yang menjawab permasalahan yang dirumuskan dan menutup penelitian ini.

BAB II

KONINKLIJKE NEDERLANDSCH INDISCH LEGER (KNIL)

Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) memainkan perang penting dalam menghasilkan patriot yang nantinya menjadi tokoh pejuang kemerdekaan, seperti A.H. Nasution, Slamet Riyadi, Oerip Soemohardjo. Meski berasal dari latar belakang etnis yang berbeda, ketiga tokoh ini pernah bertugas dalam pasukan tentara Hindia Belanda. Memasuki tahun 1945, Indonesia memberanikan diri mengumumkan kemerdekaannya, ketiganya lalu bergabung bersama untuk membentuk pasukan tentara Indonesia melawan pendudukan Belanda.

2.1 Sejarah Tentara Kerajaan Hindia Belanda (1830-1950)

Sebelum tahun 1830, pasukan yang ditempatkan di Hindia Belanda secara umum dianggap sebagai bagian dari tentara Belanda, dengan sebagian besar personelnnya direkrut dari wilayah Hindia. Namun, perubahan signifikan mulai terjadi pada periode 1820-1830, dimana ada dorongan untuk membentuk pasukan yang lebih mandiri dan khusus untuk Hindia Belanda. Pemisahan resmi antara tentara Belanda dan tentara Hindia-Belanda ditetapkan oleh Gubernur Jenderal Graaf van den Bosch melalui Keputusan Gubernur Jenderal tanggal 4 Desember 1830 No. 1. Kemudian disahkan melalui Keputusan Raja (*Koninklijk Besluit*) pada tanggal 10 Maret 1832, No. 93 dan 94.²⁵

²⁵ Anonim. 'In Memoriam: Het Koninklijke Nederland Indisch Leger', *De Militaire Spectator*, Vol. 119 (8), 1950, Hlm. 461

Luas wilayah Hindia Belanda adalah 1.905.000 km², dengan populasi mencapai 60 juta jiwa, menjadikan pertahanan wilayah sebagai tugas utama militer. Dalam hal ini, diperlukan adanya efisiensi pembagian wilayah pertahanan antara Angkatan Darat dan Angkatan Laut KNIL. Berdasarkan “Dasar Pertahanan 1927”, tujuan dari angkatan bersenjata perang Hindia Belanda, adalah: 1) Mempertahankan otoritas Belanda di Kepulauan Hindia terhadap konflik atau perlawanan dalam batas-batas wilayah tertentu, serta menjamin keamanan dan ketertiban; 2) Memenuhi kewajiban militer sebagai anggota komunitas bangsa-bangsa terhadap bangsa lain.²⁶

Pada abad ke 19, perekrutan tentara Hindia di Belanda tidak berjalan lancar, meski pihak militer telah berupaya dalam segala cara. Mulai dari pelanggaran persyaratan, peningkatan gaji, serta penempatan tiga bintang terpilih di setiap provinsi di Belanda sebagai perekrut. Akan tetapi dari sebagian mereka yang direkrut, tidak berhasil sampai ke Hindia karena alasan pelanggaran disiplin dan desersi. Sebaliknya, perekrutan orang asing diluar Belanda mendapat hasil yang lebih baik.²⁷ Antara tahun 1905 hingga 1906, akibat kekurangan pasukan Eropa, beberapa kompi Eropa di Hindia kemudian digantikan dengan kompi Ambon, dan pada tahun 1916 ditetapkan sebanyak 12 batalion lapangan, kekurangan personel dari Eropa dapat digantikan oleh orang Ambon.²⁸

²⁶ H.A. Buiskool, ‘Uit de Geschiedenis van het leger in Nederlandsch-Indie’, *De Militaire Spectator*, Vol. 110, (1941), Hlm. 13-16

²⁷ S. De Graff & D.G. Stibbe, ‘*Encyclopaedie van Nederlandsche-Indie*’, (Leiden: ’S-Gravenhage, 1918), Hlm. 559

²⁸ *Ibid*, Hlm. 560

Memasuki awal abad 20, Belanda mulai memperkenalkan wajib militer di negaranya, hal ini secara signifikan mengurangi jumlah sukarelawan yang bersedia dikirim ke Hindia Belanda. Pilihan lain ialah dengan merekrut tentara dari wilayah koloninya, yang dalam proses seleksi ini, Belanda telah mempertimbangkan beberapa kelompok etnis dari Hindia Belanda.²⁹ Pasukan pribumi didominasi oleh orang Jawa dan Sunda, namun diantara mereka, orang Ambon dianggap sebagai yang paling kuat. Pada saat perekrutan, istilah ‘orang Ambon’ ini merujuk pada penduduk asli Kepulauan Maluku maupun keturunannya, juga orang-orang dari residensi Manado (termasuk Gorontalo). Sementara, kelompok pribumi lainnya diklasifikasikan berdasarkan asal mereka: orang Jawa, Sunda, Madura, Bugis, dan Melayu (merujuk pada orang Timor, Nias, dan lainnya).³⁰

Perekrutan tentara di Hindia dilakukan secara sukarela, tanpa adanya unsur pemaksaan. Kepala pemerintah daerah (*hoofden van gewestelijk*) bertanggung jawab memfasilitasi proses perekrutan, sementara para calon tentara yang berminat harus mengajukan permohonan langsung kepada komandan militer setempat. Tentara pribumi yang berhasil direkrut akan menjalani masa dinas selama 2 hingga 6 tahun, dengan penempatan di garnisun-garnisun yang umumnya terletak di luar kota. Di wilayah-wilayah tertentu seperti Ambon, Manado, Madura, dan Timor,

²⁹ Blom, R. L., & Stelling, T. ‘Niet voor God en niet voor het Vaderland. Linkse soldaten, matrozen en hun organisaties tijdens de mobilisatie van '14-'18’. *Uitgeverij Aspekt*, [Universiteit van Amsterdam., 2004], Hlm. 734. Orang Maluku dipercaya sebagai *ethnic soldiers*, etnik yang dianggap cocok untuk menjadi tentara juga karena citra akan kesetiaan mereka kepada Belanda. Perekrutan secara khusus dikalangan ambon dimulai ketika Belanda ingin memperluas wilayah koloninya (Steijlen, 2015)

³⁰ S. De Graff & D.G. Stibbe, *Op. Cit*, Hlm. 561

para bintang dan tamtama yang berasal dari daerah tersebut diberikan cuti selama 4-6 bulan untuk kembali ke kampung halaman mereka, dengan tujuan mendukung proses perekrutan baru. Sebagai bentuk apresiasi, mereka bahkan diberikan kompensasi berupa uang jika berhasil merekrut calon tentara baru.³¹

Ketika harga cengkeh jatuh di pasar dunia, baru kemudian banyak orang Maluku mulai mendaftar sebagai serdadu KNIL. Sebagian besar orang Maluku dan Manado yang direkrut merupakan kelompok non-Muslim, dengan tujuan agar dapat menyeimbangi pasukan muslim dari Jawa, walau demikian terdapat juga kelompok Maluku dari kalangan muslim. Serdadu Maluku sendiri memiliki posisi yang cukup istimewa di kalangan KNIL, setidaknya hingga akhir Perang Dunia I. Selain perolehan gaji yang lebih tinggi, KNIL Maluku juga bisa mendapat akses pendidikan dan jaminan hidup yang lebih baik, namun posisi mereka di KNIL tetap berada di bawah tentara Eropa.

Pada tahun 1918, KNIL memiliki sekitar 7.000 tentara asal Eropa (Belanda, Belgia, Jerman, Swiss, dan Prancis) dan 30.000 tentara pribumi. Setiap kelompok etnik memiliki peran dan eksistensinya sendiri. Misalnya dalam satu brigade terdiri dari sejumlah tentara Ambon, Jawa, dan Eropa, dimana masing-masing kelompok mempertahankan identitas kulturalnya. Di barak-barak garnisun besar, tiap-tiap kelompok etnis berlomba mengembangkan identitas mereka, seperti tentara Maluku yang menonjolkan identitas keagamaan mereka.³²

³¹ Anonim, 'Het Nederlandsch-Indische Leger', *De Militaire Spectator*, Vol. 97, (1928), Hlm. 630

³² Blom, R. L., & Stelling, T [2004], Hlm. 735-736

Pembagian personel non-Eropa berdasarkan etnis pada akhir tahun 1929:
 Ambon dan Minahasa: 8731, Jawa: 14050, Sunda: 1199, Madura: 126, Bugis: 99,
 Aceh: 78, Melayu: 272, Timor: 1358.

Sebagai ilustrasi, berikut jumlah kekuatan KNIL dari tahun 1830 hingga 1930³³:

Tahun	Jumlah Tentara	Tahun	Jumlah Tentara
1830	13.545	1840	19.994
1854	27.815	1871	28.096
1880	31.981	1882	29.817
1915	35.884	1922	36.577
1925	33.266	1926	32.500
1927	36.500	1929	38.318
1930	36.922		

Tabel 2. 1 Jumlah tentara KNIL (*Militaire spectator*, 1950)

Kekuatan militer KNIL pada dasarnya berfungsi untuk memperluas wilayah Hindia Belanda di Nusantara. KNIL secara aktif terlibat dalam berbagai operasi militer untuk menduduki wilayah yang dianggap memberontak. Antara tahun 1873 hingga 1913, pasukan KNIL terlibat dalam perang Bali, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Lombok, hingga Aceh. Dari semua perang tersebut, perang Aceh menjadi yang paling sulit dan panjang, membutuhkan waktu sekitar empat puluh tahun bagi Belanda untuk sepenuhnya menguasai wilayah tersebut. Setelah kemenangan di

³³ 'In Memoriam: Het Koninklijk Nederland Indisch Leger', *Op. Cit*, Hlm. 462

Aceh, peran KNIL beralih secara bertahap, dari pasukan tempur menjadi pasukan polisi yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di Hindia Belanda.³⁴

2.2 KNIL Pada Periode Pendudukan Jepang di Indonesia (1942-1945)

Setelah restorasi Meiji pada tahun 1868, kekaisaran Jepang memulai ekspansi militer yang agresif, yang berlangsung hingga hingga pertengahan abad 20. Dimulai dengan pendudukan Taiwan (1895), perang melawan Rusia (1905), hingga invasi Jepang di Cina (1931). Demi memperkuat posisinya dalam menghadapi kekuatan Barat di Pasifik, Jepang mulai merencanakan pendudukan Asia Tenggara yang dianggap sebagai wilayah strategis, dengan sumber daya alam yang melimpah guna memasok kebutuhan Jepang semasa perang.³⁵

Ketika Jepang menjatuhkan bom di Pearl Harbor pada 7 Desember 1941, disusul Angkatan Darat Jerman yang berhasil menguasai Belanda, babak baru perang dunia kedua dimulai. Begitu Singapura jatuh ketangan Jepang, asumsi akan jatuhnya Hindia Belanda tak dapat dielak. Demi mempertahankan wilayah koloninya, Gubernur Jenderal dan para pejabat Belanda diminta untuk tidak meninggalkan pos mereka, dan KNIL diharap untuk tetap melakukan perlawanan dalam bentuk perang gerilya terhadap Jepang.

Tak butuh waktu lama bagi Jepang untuk menunjukkan keunggulannya di udara dengan membombardir pelabuhan-pelabuhan utama Hindia Belanda, seperti

³⁴ Fridus Steijlen, "In and out of uniform; Moluccan soldiers in the Dutch colonial army", in: Eric Storm and Ali Al Tuma (eds), *Colonial soldiers in Europe, 1914-1945*; "Aliens in unifor" in *wartime societies*, (London: Routledge, 2015), Hlm. 233

³⁵ M.C. Ricklefs, dkk. *Sejarah Asia Tenggara dari Masa Prasejarah sampai Kontemporer*, (Depok: Komunitas Bambu, 2013), Hlm 474-475

Surabaya dan Tanjung Priok. Didukung oleh kekuatan militer mereka yang telah menguasai wilayah Malaka, Filipina, dan sebagian Indonesia, posisi Belanda semakin terdesak. Meskipun KNIL berusaha keras untuk bertahan, setelah tiga bulan serangan bertubi-tubi, banyak pasukan Belanda yang terpaksa mundur. Walaupun ada beberapa tentara KNIL yang masih melakukan perlawanan di luar Jawa, pada akhirnya di tanggal 8 Maret 1942, Letnan Jenderal Ter Poorten secara resmi menyerah tanpa syarat kepada Jepang.³⁶

Setelah menguasai Hindia Belanda, Jepang membagi wilayah tersebut menjadi tiga zona administrasi militer: 1) Jawa dan Madura berada di bawah kuasa Angkatan Darat ke-16, 2) Sumatra oleh Angkatan Darat ke-25; kedua wilayah ini berada di bawah Angkatan Darat ke-7 yang bermaskas di Singapura. 3) Kalimantan, dan Indonesia Timur dikuasai oleh Angkatan Laut yang berpusat di Makassar. Bagi Jepang, wilayah kekuasaan Angkatan Laut itu dianggap terbelakang, baik secara politik ataupun ekonomi, mengingat pemerintah di sana yang menerapkan kekerasan dalam politiknya.³⁷

Selama masa pendudukan Jepang di Indonesia, salah satu strategi utamanya adalah dengan mengakhiri semua bentuk pengaruh Belanda, termasuk memenjarakan penduduk Eropa secara kasat mata. Sebanyak 122.000 orang tentara KNIL dijadikan tawanan perang (*Prisoner of War: POW*), namun sebagian dari mereka dibebaskan setelah ditawanan selama beberapa bulan, menyisakan 38.386

³⁶ Herman Burgers, *De Garoeda en de Ooievaar: Indonesie van kolonie tot nasionale staat*, (Leiden: KITLV Uitgeverij, 2011), Hlm. 276-278

³⁷ M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2005), Hlm. 405

orang tawanan³⁸. Fridus dalam tulisannya “*In and Out of Uniform: Moluccan soldier in the Dutch colonial army*”, menyebutkan bahwa mayoritas tawanan yang dibebaskan adalah tentara pribumi, kecuali tentara Maluku dan Manado yang dianggap sebagai kaki tangan Belanda.

Selain itu, sebanyak 42.233 tentara Belanda, juga tawanan dari negara lain, dikirim ke berbagai wilayah di Asia untuk dipekerjakan sebagai buruh paksa dalam proyek-proyek pembangunan mesin perang Jepang. Proyek ini memakan korban besar, dengan sekitar 20% tawanan meninggal dunia, setara dengan 8.200 orang. Hingga hari Jepang menyerah, banyak tawanan perang Hindia Belanda yang masih tersebar di luar wilayah Indonesia. Hanya 9.200 tawanan yang berada di Hindia Belanda, 17.000 di wilayah kuasa Britania Raya, 7.300 di daerah kuasa Amerika Serikat, dan lebih dari 100.000 tawanan berada di wilayah Timur.³⁹

Setelah Jepang merebut Indonesia, sisa-sisa pasukan KNIL di Australia mulai membangun kembali kekuatan militer mereka. Selama tiga tahun, KNIL berhasil merekrut sekitar 3.000 tentara yang terdiri dari berbagai etnis, termasuk orang Timor, orang Belanda yang direkrut di Australia dan Amerika, pekerja Indonesia dari industri kapal, serta orang asal Papua. Bersama dengan sekutu, mereka juga berhasil membentuk Angkatan Udara yang aktif menyerang kapal dan instalasi Jepang sejak tahun 1943.⁴⁰

³⁸ P.M.H. Groen, ‘Krijgsgevangenen van het KNIL tuseen wal en schip’, *De Militaire Spectator*, Vol. 164 (8), 1995, Hlm. 369

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Burgers (2011), Hlm. 335

Pada tahun 1943, Belanda mulai mempersiapkan langkah-langkah militer untuk pembebasan koloninya. Salah satu upaya yang diajukan oleh *Koninklijke Marine* (KM) adalah pembentukan brigade marinir baru yang akan membantu sekutu dalam melawan Jepang, usulan ini didukung oleh Menteri Angkatan Laut. Akan tetapi, Van Mook, selaku Menteri Kolonial, lebih berfokus pada pengerahan KNIL sebagai kekuatan utama dalam masa pemulihan pemerintahan kolonial di Indonesia. Van Mook berpendapat bahwa KNIL, yang memiliki pengalaman dan pengetahuan lokal, lebih cocok untuk menjalankan tugas ini. Namun, KM mengkritik gagasan ini, menganggap bahwa kekuatan KNIL tidak akan cukup kuat untuk turut serta dalam upaya sekutu, terutama Amerika Serikat, untuk menaklukkan koloni yang diduduki Jepang.⁴¹

Strategi Sekutu dalam menghadapi musuh sudah ditetapkan: setelah mengalahkan Jerman dan Italia, baru kemudian fokus pada penaklukan Jepang. Selain berupaya membebaskan tanah airnya, Belanda juga berambisi untuk merebut kembali Indonesia. Pada Agustus 1943, pemerintah Belanda mengusulkan pembentukan pasukan ekspedisi militer yang terdiri dari tiga divisi korps Angkatan Darat, lebih dari 5.000 marinir untuk brigade marinir, serta lima belas batalyon GBI (*Gezags Bataljons Indie*). Namun, Sekutu mengharapkan Belanda yang akan menyediakan sebagian besar tenaga kerja, sementara mereka hanya akan mendukung dengan persenjataan.

⁴¹ Maaïke van der Kloet, 'Mismanaging expectations: Dutch plans for re-establishment of the KNIL 1942-1946', *Thesis*, (Leiden: Universitas Leiden, 2016), Hlm.30

Van Mook memperingati rekan menterinya bahwa jika Belanda gagal mengembalikan kendali atas pemerintahannya di Indonesia, kemungkinan besar akan ada intervensi Amerika. Hal ini tentu dapat menjadi ancaman serius bagi otoritas Belanda di wilayah tersebut. Untuk mencegah hal ini, pada tahun 1944, Van Mook mengusulkan pembentukan sebuah organisasi sementara yang bertugas menjalankan pemerintahan di Indonesia setelah pendudukan Jepang berakhir. Organisasi tersebut diberi nama NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*), yang dibentuk di Australia sebagai basis operasionalnya.⁴²

2.3 Masuknya Belanda Kembali ke Indonesia (1945-1949)

Kawasan Pasifik Barat Daya (*South West Pasific Area*, SWPA) termasuk Indonesia (kecuali Sumatera), berada di bawah komando Jenderal Douglas MacArthur semasa perang pasifik. Setelah berhasil merebut wilayah Papua dan Filipina, MacArthur berjanji akan merebut kembali Indonesia. Di akhir tahun 1944, Gabungan Kepala Staf (*The Combined Chief of Staff*, CCS), yang terdiri dari pimpinan tertinggi militer Amerika dan Britania, mulai mempertimbangkan untuk repatriasi tawanan perang pasifik. Hingga pada 14 Juni 1945, CCS secara resmi memberikan tanggung jawab evakuasi tawanan perang kepada Jenderal MacArthur.

Semasa persiapan evakuasi POW, jumlah dan lokasi tawanan perang Jepang tidak sulit untuk dipastikan. Hingga pertengahan Agustus 1945, diperkirakan sekitar 30.000 hingga 60.000 jumlah tawanan yang tersebar di berbagai negara.⁴³ Lalu pada 15 Agustus, Indonesia resmi masuk ke wilayah Komando Asia Tenggara

⁴² Burgers (2011), Hlm. 336-337

⁴³ Groen (1995), Hlm. 370

(*South East Asia Command*, SEAC), di bawah perintah militer Britania. Pendudukan wilayah Indonesia tidak menjadi prioritas SEAC, akibatnya, proses repatriasi tawanan berlangsung lambat.

Pada tanggal 17 Agustus, diputuskan di markas Mountbatten (Pimpinan tinggi SEAC), bahwa para tawanan harus tetap berada di kamp mereka hingga bantuan dari sekutu tiba. Rangkaian proses repatriasi POW dikawal langsung oleh Angkatan Udara dan Angkatan Darat Britania Raya melalui operasi RAPWI (*Recovery of Allied Prisoners of War and Internees*). Rencana ini ditunda oleh MacArthur hingga setelah Jepang menyerah secara resmi di Tokyo, pada 2 September 1945.⁴⁴

Sementara itu, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus. Keduanya menjadi Presiden dan Wakil Presiden pertama Indonesia. Pemerintah baru Indonesia berusaha mengambil alih bekas militer Jepang, tetapi Jepang telah lebih dulu mendemobilisasi tentaranya. Setelah berita kemerdekaan menyebar, sejumlah pemuda Indonesia mulai menjarah dan mengancam pasukan Jepang untuk mendapatkan akses senjata dan amunisi,⁴⁵ yang ditandai sebagai awal mula api Revolusi Indonesia di Jawa.

Pasukan Australia berhasil mengamankan wilayah Indonesia Timur setelah menerima penyerahan diri Jepang, sehingga tidak terlihat adanya tanda-tanda pemberontakan sesampainya pemerintah Belanda tiba. Di Sumatra dan Jawa, pasukan Mountbatten juga menerima penyerahan diri Jepang, dan untuk

⁴⁴ *Ibid*, Hlm. 372

⁴⁵ Ricklefs, dkk (2013), Hlm. 553

menghindari adanya konflik, Mountbatten mengakui pemerintahan baru Indonesia sebagai pemerintah *de facto*. Memasuki bulan Oktober, rakyat Indonesia mulai menyerang oknum-oknum yang dianggap musuh, seperti bekas tentara Belanda, Jepang, orang Cina, juga Indo-Eropa.

Kedatangan pasukan Britania di Surabaya pada November untuk mengevakuasi tawanan perang, turut memicu perlawanan rakyat Indonesia. Perlawanan yang berujung dengan tewasnya komandan pasukan Britania, Jenderal Mallaby. Setelah insiden tersebut, pasukan Britania melancarkan serangan besar-besaran dan membombardir Surabaya, hingga berhasil menguasai kota dalam waktu tiga hari. Meskipun banyak korban berjatuhan, rakyat Indonesia tetap melakukan perlawanan sengit. Menyadari bahwa tanda revolusi semakin besar dan sulit dihadapi, pasukan Britania memutuskan untuk mundur dari Indonesia dan bahwa mereka tidak dapat membantu restorasi kekuasaan kolonial.⁴⁶

Pasukan Britania segera mundur antara Juni hingga Desember 1946, pada waktu yang sama, pasukan militer Belanda mulai dipulihkan dan secara bertahap memasuki beberapa wilayah Indonesia. Di bawah pimpinan Letnan van Mook, pusat pemerintahan Belanda kembali dibangun di Batavia pada Oktober 1945, setelah kedatangan van Mook sebagai Gubernur Jenderal. Namun, sengitnya perlawanan rakyat Indonesia, sehingga kekuatan militer dan polisi Belanda kesulitan menghadapinya pasukan Indonesia.⁴⁷

⁴⁶ Ricklefs, dkk (2013), Hlm 554-555

⁴⁷ Gert Oostindie, Ireen Hoogenboom, Jonathan Verwey, *Serdadu Belanda di Indonesia 1945-1950*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2016), Hlm. 8

Upaya pemulihan tentara KNIL telah dilakukan Belanda bahkan sebelum menyerahnya Jepang, dengan berfokus sisa pasukan KNIL di Australia. Pasukan profesional dibentuk kembali, dengan merekrut kembali mantan tawanan perang Jepang, maupun sukarelawan baru.⁴⁸ KNIL memiliki sekitar 75.000-80.000 tentara yang bertugas selama periode perang 1946-1950. Mayoritas pasukannya adalah orang Indo-Eropa, dengan sebagian kecil berasal dari etnis Tionghoa. KNIL juga merekrut prajurit dari berbagai suku di Indonesia, seperti Jawa, Madura, Maluku, dan Minahasa. Sebanyak 10.000 pasukan Indo-Eropa dan 'Ambon' direkrut setelah mereka dibebaskan sebagai tawanan perang. Pasukan KNIL di tahun 1945 hanya bertugas di wilayah Jawa, baru setelah akhir tahun, Belanda kemudian menempatkan unit-unit KNIL di Kepulauan Riau, Kalimantan, dan 'Timur Besar'. Dan pada tahun 1946, kembali ditempatkan unit di wilayah Sulawesi dan Bali.⁴⁹

Salah satu langkah penting adalah dengan didirikan Direktorat Pusat Pelatihan (*Directoraat Centrale Opleidingen*) pada tahun 1946, setelah pasukan Sekutu mundur dari Indonesia. DCO ini memiliki pusat pelatihan di tiga wilayah utama: Pulau Jawa (berlokasi di Cimahi, Bogor, dan Malang), Sulawesi (Tomohon), dan Maluku (Ambon dan Morotai). Tak hanya itu, Belanda juga berusaha merekrut suku-suku lain seperti orang Toraja, dengan membangun depot khusus di Makale-Rantepao, serta orang-orang dari wilayah terpencil di Ambon, termasuk Saparua,

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Oostindie & Limpach, 'Perang di Indonesia 1945-1949', dalam: Tim Penulis ODGOI, *Melawati Batas: Kekerasan Ekstrem Belanda dalam Perang Kemerdekaan Indonesia 1945-1949*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2023), Hlm. 67

Haruku, Seram Barat, dan pulau-pulau Aru serta Tanimbar. Melalui tindakan tersebut, Belanda berupaya mempertahankan kendali militer di wilayah Indonesia yang mereka klaim.⁵⁰

Perang di Indonesia berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan, baik pasukan KNIL maupun sukarelawan kewalahan. Kondisi ini memaksa Belanda untuk mengubah kebijakan bahkan merevisi Undang-Undang Dasarnya. Salah satu langkah signifikan yang diambil adalah mengirimkan 100.000 tentara wajib militer dari Belanda ke Indonesia. Selain itu terdapat ribuan pasukan tambahan yang direkrut dari berbagai wilayah di Indonesia. Diperkirakan ada sekitar 220.000 pasukan Belanda yang terdiri dari 160.000 tentara Eropa dan 60.000 tentara lokal, yang terbagi dalam KL, KM, dan KNIL.⁵¹

Dalam misi reorganisasi KNIL, Belanda kembali merekrut pemuda dari kepulauan Maluku. Selama agresi militer pertama, tentara Belanda yang terdiri dari pemuda Eropa, Indo-Eropa, dan prajurit KNIL maju melawan tentara gerilya Indonesia. Meskipun banyak pemuda Maluku bergabung dengan kelompok nasionalis, sejumlah besar tentara Maluku tetap loyal kepada Belanda, yang memperkuat anggapan bahwa orang Maluku, khususnya Ambon, setia kepada

⁵⁰ Abdurrabi Mufid, 'Peran Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger (KNIL) dalam serangan Agresi Militer I: perekrutan, reorganisasi, dan strategi anti-gerilya 1945-1947', Skripsi, (Depok: Universitas Indonesia, 2016), Hlm. 45-46. Upaya lain yang dilakukan oleh Belanda adalah memanggil kembali para pribumi eks opsir KNIL, yang dahulu terikat sumpah setia kepada Ratu Belanda. Akan tetapi, tidak semua bekas KNIL itu mau bergabung kembali. Seorang mantan opsir KNIL, Didi Kartasasmita, bersama para bekas opsir KNIL lainnya, mereka mengumpulkan tanda tangan dan mengeluarkan maklumat untuk bergabung dengan pihak Republik Indonesia. Lihat lampiran Mufid, (2016)

⁵¹ Oostindie, dkk (2016), *Op. Cit*

kolonial Belanda. Hingga mendapat julukan hinaan oleh masyarakat Indonesia kepada orang Maluku, yakni “Andjing NICA”.⁵²

Anggapan tentang orang Maluku tersebut, menyebabkan ketegangan antara pasukan Republik Indonesia dan keluarga-keluarga Maluku. Untuk menetralkan anggapan buruk masyarakat Indonesia terhadap orang Maluku, pengacara J. Latuharhary mencoba meyakinkan bahwa orang Ambon tetap setia kepada Indonesia. Namun, situasi tetap memanas, dengan pasukan Republik Indonesia mendeklarasikan perang terbuka melawan Belanda, Indo-Belanda, dan orang Ambon. Konflik ini pun meluas ke Jawa, Sulawesi, dan Sumatra. Khusus wilayah Surabaya, para Pemuda Republik Indonesia Maluku (PRIM) berhasil meyakinkan publik bahwa mereka tidak mendukung pihak Belanda, bahkan semasa perang anggota mereka banyak membantu kelompok republik melawan Jepang.⁵³

Tindakan agresif Belanda terhadap Indonesia mendapat banyak kecaman dari dunia internasional, yang memaksa Belanda menyepakati perjanjian dengan pihak Republik Indonesia. Pada 15 November 1946, kedua belah pihak merundingkan Perjanjian Linggarjati, di mana Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia, yang terdiri dari wilayah Jawa, Madura, dan Sumatra, yang nantinya akan menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat. Pada akhirnya perjanjian tersebut tidak dapat terlaksana, Belanda memilih untuk melanjutkan aksi

⁵² Steijlen (2015), Hlm. 237-238

⁵³ Dieter Bartels, *Dibawah Naungan Gunung Nunusaku 'Muslim-Kristen Hidup Berdampingan di Maluku Tengah'*, (Jakarta: PT Gramedia, 2017), Hlm. 665

Agresi Militer. Agresi militer ini terjadi dalam dua tahap: pertama, dari 21 Juli hingga 5 Agustus 1947, dan kedua, dari 19 Desember 1948 hingga 5 Januari 1949.⁵⁴

Sebelum Perjanjian Linggarjati ditandatangani, Gubernur Jenderal Van Mook membentuk Negara Indonesia Timur (NIT) pada 18 Desember 1946 melalui Konferensi Denpasar. Batas-batas wilayah NIT itu mencakup Kawasan Timur Besar (*de Grootte Oost*) yang terdapat dalam Ordonasi 26 Januari 1936 (Lembaran Negara Hindia Belanda no. 204), diantaranya: Sulawesi, Sunda kecil (Bali dan Nusa Tenggara), kepulauan Maluku, yang ibu kotanya bertempat di Makassar. Langkah ini secara langsung bertentangan dengan ketentuan Perjanjian Linggarjati, yang seharusnya melibatkan kerjasama dengan Republik Indonesia Serikat untuk pembentukan negara bagian tersebut.⁵⁵

Meskipun agresi militer meningkatkan penguasaan Belanda atas wilayah Indonesia, tantangan yang dihadapi semakin besar. Perlawanan dari pihak Republik Indonesia, terutama melalui taktik perang gerilya, mengakibatkan banyak korban di kedua belah pihak. Selama periode perang gerilya antara 1945-1949, sekitar 4.751 tentara Belanda, termasuk dari KL, KM, dan KNIL, tewas dalam pertempuran. Namun, angka tersebut belum mencakup korban dari unit tambahan seperti Palang Merah, polisi, dan pegawai lainnya. Sebaliknya, jumlah korban jiwa dari pihak Indonesia jauh lebih besar, yakni mencapai 100.000 jiwa.⁵⁶

⁵⁴ Oostindie, Hoogenboom, Verwey (2016), Hlm. 10

⁵⁵ D. Sidik Suraputra, *Revolusi Indonesia dan Hukum Internasional*, (Depok: Universitas Indonesia, 2008), Hlm. 149.

⁵⁶ Oostindie, Hoogenboom, Verwey (2016), Hlm. 11. Jumlah korban dari pihak Republik Indonesia itu, sebagian besar tewas setelah berakhirnya agresi militer II.

2.4 Pengakuan Kedaulatan NKRI dan Situasi Tentara KNIL Maluku

Setelah pembentukan NIT pada tahun 1946, antara tahun 1947 hingga 1948 berbagai negara bagian dan pemerintahan federal lainnya juga didirikan, perbedaannya bahwa proses pembentukan negara-negara ini melibatkan kerja sama dengan pihak Republik Indonesia. Kecaman internasional terhadap upaya Belanda menguasai Indonesia melalui kekuatan militer semakin menguat, akhirnya diadakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag antara Agustus dan November 1949. Dalam konferensi tersebut, Belanda akhirnya resmi mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember.⁵⁷

Kesepakatan KMB menetapkan pihak Republik Indonesia sebagai penanggung jawab keamanan wilayah. Angkatan Darat dan Angkatan Udara Belanda harus dipulangkan dalam waktu enam bulan, sedangkan Angkatan Laut diberikan waktu satu tahun karena keterbatasan transportasi kapal. KNIL direncanakan bubar pada Juli 1950. Sementara menunggu pemulangan, pasukan Belanda dan KNIL ditempatkan di rayon-rayon. Sebagian pasukan KNIL bersiap untuk bergabung dengan APRI (Angkatan Perang RI), sementara sisanya dipindahkan ke Angkatan Darat Belanda.⁵⁸ Sebanyak 26.000 pasukan telah bergabung dengan APRI, dan 10.000 lainnya bergabung sebelum KNIL resmi dibubarkan. Selain itu, 10.000 tentara lainnya didemobilisasi di berbagai lokasi di

⁵⁷ Fridus Steijlen, 'RMS van Ideaal tot Sysmbool: Molukse Nationalisme in Nederland 1951-1994', *Thesis*, (Amsterdam: Amsterdam University, 1996), Hlm. 34-35

⁵⁸ Burgers (2011), Hlm. 655. Mereka yang dipindahkan ke Angkatan Darat Belanda, sebagian besar berasal dari ras Indo-Eropa dan tentara KNIL Maluku, keduanya diperintah untuk pergi ke Belanda.

Indonesia, yang menyisakan sekitar 4.000 tentara Maluku di Jawa untuk didemobilisasi.⁵⁹

Ketika Belanda mengakui kedaulatannya, wilayah Republik Indonesia hanya mencakup pulau Jawa dan Sumatera, bersama lima belas negara lainnya masuk kedalam struktur negara federal (RIS), kecuali Nugini Barat yang menjadi negara bagian Belanda. Tepat pada Januari 1950, sebagian negara-negara federal dibubarkan dan bergabung dengan Republik Indonesia Serikat (RIS). Faktanya, RIS juga tak bertahan lama, setelah sisa negara bagian lainnya kemudian dibubarkan, diputuskan pada 15 Agustus Republik Indonesia Serikat berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).⁶⁰

Berita mengenai pengakuan kedaulatan Indonesia dengan cepat menyebar ke wilayah Timur Indonesia. Disusul dengan berita pembubaran NIT dan akan bergabung dengan Indonesia, seorang tokoh asal Maluku yang merupakan Menteri Kehakiman NIT, Mr. Sumoukil menampakkan kekecewaannya atas tindakan NIT. Sehingga, Soumokil dengan dalih inspeksi kepolisian, mengirim pasukan polisi dan mengerahkan 200 anggota KNIL yang dikenal sebagai pasukan Istimewa (*Korps Speciale Troepen*) menuju kota Ambon. Hingga awal April, jumlah tentara KNIL di Ambon diperkirakan mencapai 2.000 orang.

Setibanya Mr. Sumoukil di kota Ambon, pada tanggal 23 April bersama dengan anggota Dewan NIT asal Maluku, Ir. Manusama, keduanya mengadakan rapat yang dihadiri oleh sebagian besar anggota KNIL, anggota kepolisian dibawah

⁵⁹ *Ibid*, Hlm. 708

⁶⁰ Steijlen (1996), Hlm. 34-35

pimpinan Sumoukil, sebagian pemuka rakyat, guna membahas pembubaran NIT. Dalam pertemuan itu, diputuskan untuk mendirikan negara merdeka, Republik Maluku Selatan (RMS). Soumokil kemudian menghubungi Badan Pemerintahan Harian Daerah Maluku Selatan (PEMDA) dan mendesak mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan RMS.⁶¹ Pada tanggal 24 April 1950, di bawah tekanan Soumokil dan para pendukungnya, pimpinan Dewan Maluku Selatan, Manuhutu, membacakan teks proklamasi RMS. Proklamasi tersebut diumumkan melalui Radio Ambon pada hari berikutnya, dan pada 26 April, teks proklamasi dikirim ke Perwakilan Belanda di Jakarta dalam bahasa Belanda.⁶²

Pejabat KNIL memiliki kebijakan untuk mendemobilisasi tentaranya di tempat asal mereka, termasuk tentara KNIL asal Maluku. Saat RMS diproklamasikan, sekitar 3.500 tentara Maluku yang berada di Jawa menunggu untuk dipulangkan dan didemobilisasi di Maluku. Namun, karena banyak dari mereka mendukung gerakan KNIL Maluku dan RMS, proses demobilisasi mereka menjadi rumit. Pemerintah Indonesia dan Belanda khawatir bila mengirim tentara Maluku yang terlatih ke Maluku akan memperburuk situasi. Pilihan untuk mendemobilisasi di Jawa juga tidak ideal karena ketegangan antara tentara Maluku dan masyarakat setempat. Untuk menjaga kontrol atas tentara Maluku, saat KNIL dibubarkan pada 26 Juli 1950, Belanda telah lebih dulu mengintegrasikan tentara Maluku ke dalam Angkatan Darat Kerajaan Belanda (*Koninklijk Landmacht*).⁶³

⁶¹ Rukmy, *Apa dan Siapa RMS: Republik Maluku Selatan*, (Jakarta: Timpani Publishing, 2006), Hlm. 34-36.

⁶² Steijlen (1996), Hlm. 40

⁶³ Steijlen (2015), Hlm. 238

Setelah gerilya di Ambon dihentikan pada November, pemerintah Indonesia mengizinkan tentara Maluku untuk demobilisasi di Maluku. Tetapi mereka menolak tawaran tersebut, karena merasa terancam jika berada di bawah otoritas pemerintah Indonesia.⁶⁴ Sebagai solusi, tentara Maluku kemudian diberikan tiga pilihan: Bergabung dengan tentara Indonesia, demobilisasi di tempat (di Jawa), atau kemudian pergi ke Belanda untuk sementara waktu, yang diperkirakan pemerintah Belanda hanya sampai enam bulan. Tentara Maluku tetap tidak ingin memilih satu diantara ketiganya, bahkan meminta untuk dipindahkan ke Papua, wilayah di luar Indonesia yang paling dekat dengan Kepulauan Maluku.

Pemerintah Belanda yang mengalami kebuntuan permasalahan ini, memecah tentara Maluku dengan memberi perintah untuk pergi ke Belanda. Pada saat yang sama, delegasi Maluku yang tengah berada di Belanda menyarankan tentara-tentara tersebut untuk pergi sementara ke Belanda, lalu sebanyak 12.500 keluarga tentara Maluku pun setuju untuk pergi ke Belanda secara bertahap, antara februari hingga Maret 1951.⁶⁵

⁶⁴ Burgers (2011), Hlm. 708

⁶⁵ Steijlen (2015), Hlm. 239